

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pengelolaan BUMDes Mpili Jaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan kewenangan BUMDes berdasarkan undang-undang No.6 tahun 2014 yaitu menjalankan usaha ekonomi dan pelayanan umum terhadap masyarakat menggunakan BUMDes. Kewenangan ini menjadi rujukan BUMDes untuk mengembangkan usaha agar peningkatan ekonomi desa dapat tercapai serta meningkatkan pendapatan asli desa dan mengelola sumber daya ada di Desa Mpili Kecamatan Donggo.
  - a. Kewenangan BUMDes Berdasarkan UU No. 06 Tahun 2014
  - b. Peraturan Bupati Bima Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes
  - c. Peraturan Desa Mpili Nomor 1 Tahun 2017 Tentang BUMDes Mpili Jaya
2. Implementasi peran BUMDes di Desa Mpili yaitu dengan menyediakan jenis usaha yang dapat membantu masyarakat berupa Usaha Desa Simpan Pinjam (UDSPP) dengan tujuan untuk memberikan bantuan modal bagi pelaku usaha kecil-kecilan. Dengan adanya bantuan modal yang diberikan BUMDes, maka perkembangan usaha masyarakat dapat mendongkrak usaha mikro.

## B. Saran

Berdasarkan wawancara tersebut di atas maka penulis memberika rekomendasi sebagai berikut

1. Pengaturan kewenangan BUMDes harus dikelola dengan peraturan Bupati/Kabupaten Bima.
2. Peran BUMDes harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat termasuk dalam aspek kesejahteraan perekonomian masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Aprianus Umbu Reada Ndata Meha” 2012. *Dinamika Hubungan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pembangunan*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD.
- Damin, Sudarman, 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Pembangunan (PSDSP), 2007. Fakultas Ekonomi, *Buku Panduan dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta: Universitas Brawijaya
- HAW Widjaja 2002. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Surabaya: Grafindo.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moch. Solekhhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Cet: Ke 3*. Malang, Setara Press.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Ridwan HR, 2013. *Hukum Administarasi Negara*, Jakarta:PT Grafindo Persada.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Cet: Pertama*, Jakarta: Rineka cipta.
- Seyadi, 2003. *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN
- Sudarman Damin, 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Bandung : CV Pustaka Setia

Sukandarrumidi, 2004. *Metode Penelitian; Petunjuk Paraktis Untuk PenelitianPemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Surachmad, Winarno, 2003. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito

Surya, Putra, 2015. *Buku 7 Badan Usaha Milik desa: Spirit Kolektif desa, Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*.

Trianto, 2010. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

William Wiersma, 1986. *Research Methods in Education: An Introduction*. London: Allyin and Bacon, Inc

Winarno Surachmad, 2003. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

## **C. JURNAL/SKRIPSI**

Bagir Manan, 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten ,dan kota dalam rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad, Bandung.

Bambang, 2017. *Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer*, Jurnal Universitas Jendral Soedirman, 3(2), 109-131.

Moh Raysid, 2015. *Aplikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Mewujudkan Kesejah Teraan Masyarakat Pedesaan*, jurnal yudisia, vol, 6 no. 2.

## **D. INTERNET**

Evi Fitriyani Aulia “*Kekuasaan dan Kewenangan*”,(Online), ([Http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan](http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan),diakses 17 Desember 2017).